



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 34 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 7)

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
23. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
24. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
25. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.080.408.836.385,00 yang bersumber dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah;
- b) Pendapatan transfer;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 43.947.404.951,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak daerah;
 - b) Retribusi daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.750.523.227,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.194.335.540,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.711.134.292,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 16.291.411.892,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.750.523.227,00.yang terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Reklame;
 - d) Pajak Penerangan Jalan;
 - e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - g) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000,00;
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00;
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00;
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.800.000.000,00;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.580.523.227,00;
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp850.000.000,00;

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.194.335.540,00 yang terdiri atas:
 - a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - e) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Terminal;
 - c) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
 - e) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana ayat (1) huruf c adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00;
- (6) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00;
- (7) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 67.059.000,00;
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00;
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana ayat 2 huruf e direncanakan sebesar Rp 135.000.000,00;
- (10) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp 949.015.000,00;
- (11) Retribusi Terminal sebagaimana ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00;
- (12) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp 45.429.540,00;
- (13) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp 237.832.000,00;
- (14) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00;
- (15) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00;
- (16) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00;
- (17) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00;
- (18) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana ayat (4) direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00;

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp 15.711.134.292,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.291.411.892,00 yang terdiri atas:
 - a) Jasa Giro;
 - b) Pendapatan Bunga;
 - c) Pendapatan dari Pengembalian;
 - d) Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Jasa Giro sebagaimana ayat (1) huruf a diatas direncanakan sebesar Rp 1.009.200.000,00;
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana ayat (1) huruf b diatas direncanakan sebesar Rp 663.595.135,00;
- (4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana ayat (1) huruf d diatas direncanakan sebesar Rp 513.736.757,00;
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana ayat (1) huruf e diatas direncanakan sebesar Rp 14.104.880.000,00;

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 973.409.940.276,00 yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana ayat (1) huruf a diatas terdiri dari :
 - a) Dana Perimbangan
 - b) Dana Desa
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana ayat (1) huruf b diatas adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi;
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 870.015.555.276,00 terdiri atas :
 - a) DBH yang direncanakan sebesar Rp 203.578.138.276,00;
 - b) DAU yang direncanakan sebesar Rp 387.460.480.000,00;
 - c) DAK Fisik yang direncanakan sebesar Rp 66.676.500.000,00;
 - d) Dak Non Fisik yang direncanakan sebesar Rp 92.747.410.000,00.

- (5) Dana Desa sebagaimana ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp103.394.385.000,00;
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebagaimana ayat (3) direncanakan sebesar Rp 27.402.316.595,00;
- (7)

Pasal 10

Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp10.856.012.951,00, yang merupakan hibah dari pemerintah pusat

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.078.408.836.385,00 yang terdiri atas:

- a) Belanja operasional;
- b) Belanja modal;
- c) Belanja tidak terduga; dan
- d) Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 726.145.783.921,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 396.184.533.346,00;
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 270.631.437.348,00;
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 58.939.844.127,00;
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 592.500.000,00;

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 396.184.533.346,00; yang terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 300.221.606.341,00;
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 43.999.964.676,00;
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 42.502.394.357,00;
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.968.167.972,00;
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp492.400.000,00;

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 339.516.078.110,00 yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Tunjangan Khusus ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 225.187.247.604,00;

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.657.906.439,00;
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.681.919.344,00;
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.643.731.120,00;
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.120.741.492,00;
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.075.706.489,00;
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 782.586.614,00;
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.534.029,00;
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 13.951.521.969,00;
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 529.178.073,00;
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.587.533.168,00.
- (13) Belanja Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 39.294.530.000,00.

Pasal 15

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 43.999.964.676,00.

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 42.502.394.357,00 yang terdiri atas:
 - a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - d) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - e) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - f) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

g) Belanja Honorarium

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas direncanakan sebesar Rp487.750.000,00;
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatas direncanakan sebesar Rp147.787.627,00;
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatas direncanakan sebesar Rp 36.000.930.000,00
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatas direncanakan sebesar Rp 2.402.910.000,00
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatas direncanakan sebesar Rp 890.690.000,00
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatas direncanakan sebesar Rp 1.975.926.730,00
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatas direncanakan sebesar Rp 596.400.000,00

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.968.167.972,00yang terdiri atas:
 - a) Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c) Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d) Belanja Uang Paket DPRD;
 - e) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i) Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 561.540.000,00;

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.175.800,00;
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 97.304.720,00;
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 58.154.000,00;
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 814.233.000,00;
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 77.830.200,00;
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 11.510.100,00;
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.890.000.000,00;
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 315.000.000,00;
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 285.510.152,00
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.587.000.000,00;
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 2.970.000.000,00;
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 224.910.000,00.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 492.400.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 92.400.000,00; dan
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 270.631.437.348,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOK; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 64.210.126.529,00;
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 91.592.473.556,00;
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.766.930.093,00;
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 72.996.697.500,00;
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.521.650.000,00;
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.542.034.070,00; dan
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 14.001.525.600,00.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 58.939.844.127,00 yang terdiri atas :
 - a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - c) Belanja Hibah Dana BOSP.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.038.308.127,00;
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 794.616.000,00; dan
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP Psebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.106.920.000,00;

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 592.500.000,00 yang merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 592.500.000,00;

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 169.903.214.663,000 yang terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Tanah;
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f) Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.833.000,00;
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.954.936.643,00;
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 70.629.762.020,00;
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 65.115.463.000,00;
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.887.220.000,00; dan

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.245.000.000,00.

Pasal 23

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.833.000,00 yang merupakan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan tempat kerja direncanakan sebesar Rp70.833.000,00.

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.954.936.643,00 terdiri atas :
- a) Belanja Modal Alat Besar;
 - b) Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d) Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h) Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i) Belanja Modal Komputer;
 - j) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k) Belanja Modal Alat peraga;
 - l) Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
 - m) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.896.500.000,00
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.787.275.000,00
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 29.800.000,00
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 14.900.000,00
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.656.725.857,0

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 477.087.810,00
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.436.508.000,00
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 247.144.596,00
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 4.977.390.980,00
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 8.250.000,00
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 103.354.400,00.

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 70.629.762.020,00 terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.662.662.020,00; dan
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.967.100.000,00.

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 65.115.463.000,00 terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b) Belanja Modal Bangunan Air;
 - c) Belanja Modal Instalasi; dan
 - d) Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.009.994.000,00
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.079.320.000,00
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.909.450.000,00
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.116.699.000,00

Pasal 27

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.887.220.000,00 terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.819.220.000,00
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 68.000.000,00

Pasal 28

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.245.000.000,00 terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
 - b) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.945.000.000,00
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00

Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.301.851.877,00

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp 175.855.455.024,00 yang terdiri atas:

- a) Belanja Bagi Hasil; dan
- b) Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana ayat (1) huruf a Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp 1.194.485.876,00
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 174.660.969.148,00

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp26.793.161.612,00 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp 24.793.161.612,00 yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan sebesar Rp24.793.161.612,00 yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja;
 - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.859.259.000,00
- (3) Sisa Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.524.844.297,00
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.409.058.315,00

Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00

Pasal 35

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 36

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(22.793.161.612,00)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp22.793.161.612,00

Pasal 37

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2) Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 3) Lampiran III.a : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD pemeberi Hibah;
- 4) Lampiran III.b : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD pemeberi Hibah;

- 5) Lampiran IV.a : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- 6) Lampiran IV.b : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- 7) Lampiran V.a : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- 8) Lampiran V.b : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- 9) Lampiran VI.a : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Belanja bagi hasil Kepada Pemerintah Desa;

Pasal 38

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	CEKDA	1
2		2
3	PLt. Kz BKAD	3
4	Bg. Halkan Bid. Asyura	4
5		5

Ditetapkan di Lasusua
padatanggal, 29 Desember 2023

Pj. **BUPATI KOLAKA UTARA**



SUKANTO TODING

Diundangkan di Lasusua
padatanggal, 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 34



KABUPATEN KOLAKA UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.947.404.951,00
4.1.01	Pajak Daerah	9.750.523.227,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	120.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	100.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	100.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	20.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	20.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	600.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	600.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	600.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.800.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.800.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.800.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	600.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	600.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.580.523.227,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.580.523.227,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.580.523.227,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	850.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	850.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	850.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.194.335.540,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	432.059.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	40.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	40.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	67.059.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	37.059.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	40.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	135.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	135.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.562.276.540,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	949.015.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	268.575.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	350.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	330.440.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	45.429.540,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	45.429.540,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	237.832.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	237.832.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	10.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	20.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Pertzinan Tertentu	200.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.711.134.292,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.711.134.292,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.711.134.292,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.711.134.292,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.291.411.892,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.009.200.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.009.200.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.009.200.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	663.595.135,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	663.595.135,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	663.595.135,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	513.736.757,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	513.736.757,00
4.1.04.15.16.0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	513.736.757,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	14.104.880.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	14.104.880.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	14.104.880.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.000.812.256.871,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	973.409.940.276,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	870.015.555.276,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	203.578.138.276,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.216.789.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.249.889.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	101.643.542.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	92.847.276.276,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.730.148.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.890.494.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	507.013.507.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	387.460.480.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	23.236.785.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	56.482.759.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	19.700.362.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.933.121.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.676.500.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	604.089.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.405.849.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.667.920.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.433.722.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.603.074.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	951.329.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	9.487.674.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.324.942.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	31.197.901.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	92.747.410.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	17.806.920.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.300.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	36.000.930.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	890.690.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.402.910.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.916.400.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	302.401.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.691.250.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	415.178.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	390.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.612.400.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10.058.180.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.915.151.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	103.394.385.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	103.394.385.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	103.394.385.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.402.316.595,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.402.316.595,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.402.316.595,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.057.344.182,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.170.536.699,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.631.532.287,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.903.427,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.537.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.856.012.951,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.888.702.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.888.702.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.888.702.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.888.702.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.967.310.951,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.967.310.951,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.967.310.951,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.967.310.951,00
	Jumlah Pendapatan	1.055.615.674.773,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	726.348.314.821,00
5.1.01	Belanja Pegawai	396.184.533.346,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	300.221.606.341,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	225.187.247.604,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	190.268.136.236,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.919.111.368,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.657.906.439,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.296.541.935,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.361.364.504,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.681.919.344,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.681.919.344,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.643.731.120,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.643.731.120,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.120.741.492,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.234.087.792,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.886.653.700,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.075.706.489,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.310.794.596,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.764.911.893,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	782.586.614,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	643.146.614,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	139.440.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.534.029,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.631.547,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	902.482,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.951.521.969,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.904.038.051,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.047.483.918,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	529.178.073,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	451.632.939,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	77.545.134,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.587.533.168,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.263.968.478,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0002	Belanja turan Jaminan Kematian PPPK	323.564.690,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	43.999.964.676,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	43.496.924.676,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	43.496.924.676,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	84.000.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	84.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	36.840.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	36.840.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	382.200.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	382.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.502.394.357,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	487.750.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	6.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	27.500.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	18.750.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	250.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	120.500.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	147.787.627,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	19.500.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.500.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.000.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Utang	2.000.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.750.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	29.950.750,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.019.150,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	6.776.127,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	11.791.600,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	500.000,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	30.000.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.000.930.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	36.000.930.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.402.910.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.402.910.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	890.690.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	890.690.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.975.926.730,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.975.926.730,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	596.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	275.400.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	294.000.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	27.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.968.167.972,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	75.175.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	75.175.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.304.720,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.304.720,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	58.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	58.154.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.830.200,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.830.200,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	11.510.100,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	11.510.100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	285.510.152,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	285.510.152,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.587.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	55.500.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	21.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	25.500.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.485.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.970.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.970.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	224.910.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	224.910.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	492.400.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.631.437.348,00
5.1.02.01	Belanja Barang	64.210.126.529,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.885.826.529,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	336.003.100,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	679.990.040,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.282.724.700,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	37.050.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	171.070.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	946.163.510,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	496.358.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	983.056.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	217.772.500,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.220.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.262.148.016,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.153.465.650,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.028.118.050,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180.738.460,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	331.972.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	396.106.370,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	229.506.700,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.645.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	607.752.425,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.600.398.050,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.870.630.578,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.785.891.080,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.672.469.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	215.346.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	40.275.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.804.625.100,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.852.915.200,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.340.580.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.519.179.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	527.454.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	293.660.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.300.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	1.942.500,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	344.950.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	896.050.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	70.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	346.820.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	417.182.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	565.797.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	2.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	237.500.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	57.500.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	180.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	86.800.000,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	86.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	91.592.473.556,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	62.548.299.056,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.281.738.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	611.750.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.671.700.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.080.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	19.670.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	282.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.106.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.236.483.460,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	444.040.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.581.600.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.191.600.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.186.050.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	193.700.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	303.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	292.800.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	373.250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.004.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	669.110.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	681.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.370.840.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.120.153.058,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	595.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	342.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.706.600.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	255.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	189.600.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	19.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21.775.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	61.400.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	690.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.150.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	63.600.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	179.445.200,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.003.640.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	275.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	874.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	257.740.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	659.363.400,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.941.885.538,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	508.020.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.773.468.600,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	38.373.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	57.669.800,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.584.384.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	1.100.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	70.200.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	137.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.964.652.500,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.425.672.500,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.200.000.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	201.600.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	57.600.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	72.000.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	7.780.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	17.889.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	11.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	6.889.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.056.065.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	418.525.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	81.385.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	237.025.000,00
5.1.02.02.04.0119	Belanja Sewa Alat Pengukur Waktu	1.600.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	6.980.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	86.500.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	162.400.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	6.650.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	19.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0505	Belanja Sewa Peralatan Permainan	1.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.188.600.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	276.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	170.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	391.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	475.950.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	864.650.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	203.400.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	169.000.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	34.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	20.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.125.000.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	8.125.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	50.000.000,00
5.1.02.02.10.0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	50.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	482.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	22.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	460.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.241.568.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.807.568.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.902.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.509.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	22.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	695.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	445.000.000,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	250.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.766.930.093,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.735.278.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	46.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	638.388.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	31.000.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	72.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.287.580.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	990.540.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	37.210.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	371.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	132.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	28.000.000,00
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	39.650.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	256.540.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.440.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	57.000.000,00
5.1.02.03.02.0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	26.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	198.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	111.700.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	189.730.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.501.652.093,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.792.200.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	449.452.093,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	60.000.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	200.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.530.000.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.000.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.500.000.000,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	300.000.000,00
5.1.02.03.04.0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	350.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	180.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	72.996.697.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.996.697.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.946.584.500,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	13.820.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.650.090.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.134.000.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	252.203.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.521.650.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.729.150.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	266.650.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	116.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.344.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	792.500.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	750.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	42.500.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.542.034.070,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.542.034.070,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.542.034.070,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.001.525.600,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.001.525.600,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.001.525.600,00
5.1.05	Belanja Hibah	58.939.844.127,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	39.038.308.127,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.864.012.127,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.864.012.127,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.310.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.810.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.500.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	864.296.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	864.296.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	794.616.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	794.616.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	794.616.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	19.106.920.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	19.106.920.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	19.106.920.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	592.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	232.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	232.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	232.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	360.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	360.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	360.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	169.903.214.663,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	70.833.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	70.833.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	70.833.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	70.833.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.954.936.643,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.896.500.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.895.000.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.830.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	65.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.500.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.787.275.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.787.275.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.435.350.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.195.785.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.221.140.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	135.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.800.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	29.800.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	29.800.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	29.800.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	14.900.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	14.900.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.400.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	10.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.656.725.857,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.198.525.636,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	29.200.890,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.169.324.746,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.605.611.331,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.474.588.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.584.190,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	579.239.141,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	3.200.900,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	466.200.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	78.800.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	852.588.890,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	352.821.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	7.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	195.306.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	97.244.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	37.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	163.217.890,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	477.087.810,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	364.987.810,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	229.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	105.987.810,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	112.100.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	36.000.000,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	4.800.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	12.600.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	58.700.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.436.508.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.009.158.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.001.558.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	7.600.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.427.350.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.427.350.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	247.144.596,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	230.700.000,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	3.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	227.700.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	16.444.596,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	16.444.596,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.977.390.980,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.984.415.980,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	200.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.455.995.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	328.420.480,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.992.975.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	167.475.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.640.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	185.500.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8.250.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	8.250.000,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	8.250.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	300.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	300.000.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	300.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	20.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	20.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	20.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	103.354.400,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	103.354.400,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	103.354.400,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.629.762.020,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	68.662.662.020,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.798.872.020,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.700.365.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.683.586.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	25.490.320.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	700.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	400.750.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.638.637.020,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	500.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.893.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.012.214.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	110.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	620.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.863.790.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.697.250.000,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	166.540.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.967.100.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.967.100.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.332.600.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	634.500.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.115.463.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.009.994.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	39.881.744.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	39.025.244.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	526.500.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	330.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.128.250.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.128.250.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.079.320.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	787.770.000,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	202.170.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	585.600.000,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.542.490.000,00
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	1.542.490.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.221.490.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.010.340.000,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	211.150.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.489.300.000,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.489.300.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.038.270.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4.038.270.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.909.450.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.909.450.000,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.909.450.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.116.699.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.448.699.000,00
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	1.448.699.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.668.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.668.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.887.220.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.819.220.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.819.220.000,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	2.100.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.100.000,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	2.100.000,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	2.100.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	6.300.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	7.350.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	2.100.000,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	1.696.000.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.099.070.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	68.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	68.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	50.000.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	3.000.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	15.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.245.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.945.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.945.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	470.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.275.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	200.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	300.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	300.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	300.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.301.851.877,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.301.851.877,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.301.851.877,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.301.851.877,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.301.851.877,00
5.4	BELANJA TRANSFER	175.855.455.024,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.194.485.876,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	975.052.322,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	975.052.322,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	975.052.322,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	219.433.554,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	219.433.554,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	219.433.554,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	174.660.969.148,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	174.660.969.148,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	103.394.385.000,00
5.4.02.05.01.0002	Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa	103.394.385.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	71.266.584.148,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	71.266.584.148,00
	Jumlah Belanja	1.078.408.836.385,00
	Total Surplus/(Defisit)	-22.793.161.612,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.793.161.612,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.793.161.612,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	1.859.259.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	1.859.259.000,00
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	0,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.859.259.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	20.524.844.297,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.524.844.297,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.524.844.297,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	2.409.058.315,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	300.000.000,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	300.000.000,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	2.109.058.315,00
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	2.109.058.315,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	22.793.161.612,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kolaka Utara, 29 Desember 2023

Pj Bupati

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	
2		2 
3	PLt. Ka BKAD	3 
4	Bg. Hukum	4 
5	Bid. Hukum	5 



Dr. Ir. SUKANTO TODING, M.SP., MA